

KONDISI SOSIAL EKONOMI KELUARGA PASCA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (Studi Kasus Industri Tekstil di Kecamatan Dayeuhkolot-Kabupaten Bandung-Jawa Barat)

Abu Hanifah dan Suyanto

ABSTRACT

This was a case studies research done by using qualitative approach. This research was done in Kabupaten Dayeuhkolot specifically targeting Desa Cangkuang Wetan, Desa Citeureup, and Desa Pasawahan. The problem faced by the families of those who got a Termination of Employment was that they cannot meet their minimum basic needs because the companies have not paid their severance. To overcome these problems, they are forced to borrow some money from relatives, friends and neighbors. Potentials owned by the victims of the termination of employment is that most of them still in their productive age and have the skills that allow for them to find new jobs that match the skills they have. There are several environment potency than can be used to overcome the problems faced by the victims of termination of employment some of them are the availability of various types of companies that allow for them to apply for a job. In addition Kabupaten Dayeuhkolot residents who are predominantly Muslim is a potential source if it can be resuscitated to carry out their responsibility to pay zakat and/ alms managed through Rumah Zakat. It is very possible considering the kinship system in this area is very close and interwoven relationship between citizens fairly intensively through existed social organizations or associations of local government. The local government is committed enough to solve this problem, of which, Office of Industry and the Department of Manpower and Transmigration has conducted skills training to victims of termination of employment and trying to distribute them to work in companies that exist in this area. Besides, there are thoughts of the District government to implement empowerment programs for the families of those who got a termination of employment in Dayeuhkolot.

Keywords : Social – Economic Condition, Family and Termination of Employment

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia mengalami dua kali guncangan ekonomi, yaitu krisis moneter pada akhir tahun 1997 dan krisis ekonomi global pada tahun 2008. Dampak dari krisis ekonomi global terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) karena industri berbasis ekspor menderita oleh menurunnya pesanan dari pasar global yang berujung pada menurunnya produktivitas (Kompas, 6/2-2009). Sebagian besar korban PHK berada di Pulau Jawa. Mereka umumnya bekerja sektor manufaktur, tekstil dan produk

tekstil, dan otomotif. Buruh kontrak menjadi sasaran utama PHK, ketimbang mereka yang berstatus karyawan tetap. Berdasar Undang-Undang Ketenagakerjaan, pesangon PHK bagi buruh tetap bisa mencapai 32 kali gaji. Adapun terhadap buruh kontrak, pemakai jasa bisa memutuskan kontrak kerja dengan perusahaan pemasok buruh kontrak tanpa perlu melapor ke Dinas Tenaga Kerja setempat (Kompas, 18/3-2009).

Korban PHK berdasarkan data tim Pemantauan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebanyak 37.905 buruh,

dan sebanyak 16.329 buruh telah dirumahkan karena pabrik tak lagi optimal memproduksi (Kompas, 6/3-2009). Dari jumlah tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Mustofa Djamaluddin menyatakan, korban PHK isektor industri tekstil mencapai 18.000 orang dan sebanyak 5.000 orang telah dirumahkan. Dalam kaitannya dengan PHK tersebut, Sekretaris Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ernovian G. Ismy mengatakan, dari sisi order, industri tekstil diperkirakan hanya bisa bertahan sampai Mei atau Juni. Pemasaran jangka panjang sudah sulit. Pola pemasaran berubah dari bulan, triwulan, atau semester, dan tidak ada yang untuk setahun. Pengusaha berupaya memperhatikan tingkat utilitas 70-80 persen. Apabila daya beli semakin sulit dan utilitas produksi anjlok lagi menjadi 50 persen, industri tekstil terpaksa mengambil pilihan terakhir, yaitu pemutusan hubungan kerja.

Korban PHK pada umumnya tidak mempunyai modal usaha untuk membuka usaha baru, karena perusahaan tempat mereka bekerja membayar pesangon dengan cara mencicil, dan untuk mencari pekerjaan baru tidak mudah, disamping terbatasnya keterampilan yang mereka miliki, juga faktor umur ikut berpengaruh terhadap penerimaan tenaga kerja. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial – ekonomi keluarga, terutama berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, seperti : sandang; pangan; papan; pendidikan anak; dan kesehatan. Mereka (keluarga terkena PHK) ini termasuk kategori kemiskinan sementara (*transient poverty*). Apabila kemiskinan sementara tidak segera ditangani dapat menjadi kemiskinan kronis (*chronic poverty*). Baik kemiskinan kronis maupun kemiskinan sementara adalah termasuk sasaran program Pemberdayaan Fakir Miskin (lihat : Depsos RI, 2005:18).

Korban PHK, disamping termasuk sasaran Program Pemberdayaan Fakir Miskin, juga termasuk sasaran Program Pemberdayaan Peran Keluarga, khususnya keluarga bermasalah sosial – ekonomi akibat adanya perubahan peran secara mendadak, misalnya kematian, kehilangan sumber mata pencaharian, salah satu anggota keluarga yang dipenjarakan, perceraian atau perpisahan (Depsos RI, 2003:15).

Sehubungan dengan hal itu sebagai langkah awal dalam kaitannya dengan

pelayanan sosial yang komprehensif perlu didukung dengan data dan informasi tentang kondisi sosial-ekonomi keluarga pasca PHK dan potensi lingkungan serta komitmen pemerintah daerah dalam penanganan masalah sosial-ekonomi keluarga korban PHK.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang di ajukan adalah : “Bagaimana kondisi sosial-ekonomi keluarga pasca pemutusan hubungan kerja?”. Dari rumusan masalah tersebut dijabarkan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik permasalahan dan potensi keluarga yang terkena PHK ?
2. Apa saja potensi lingkungan yang dapat dipergunakan untuk penanganan masalah PHK ?
3. Bagaimana komitmen pemerintah daerah dalam penanganan masalah sosial-ekonomi keluarga pasca PHK ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Teridentifikasinya karakteristik permasalahan dan potensi keluarga yang terkena PHK;
2. Teridentifikasinya potensi lingkungan yang dapat dipergunakan untuk penanganan masalah sosial-ekonomi yang dihadapi korban PHK;
3. Teridentifikasinya komitmen pemerintah daerah dalam penanganan masalah sosial-ekonomi keluarga korban PHK.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat studi kasus dengan menggunakan pendekatan deskriptif – kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan : wawancara; observasi; studi dokumentasi; dan *Focus Group Discussion* (FGD). Wawancara dilakukan terhadap keluarga korban PHK dan instansi sektoral, antara lain : Dinas Sosial; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Perindustrian; Perusahaan/ Industri Tekstil. Observasi dilakukan untuk melihat kondisi sosial – ekonomi keluarga korban PHK dan potensi lingkungan sekitar tempat tinggal keluarga korban PHK tersebut. Studi dokumentasi berupa

data sekunder diperoleh dari mempelajari buku atau laporan tentang wilayah penelitian, seperti Kabupaten Bandung Dalam Angka (dari BPS) dan profil kecamatan dan desa yang menjadi sasaran penelitian. *Focus Group Discussion* (FGD) dilakukan dengan tokoh masyarakat formal dan informal di desa tempat domisili sebagian besar keluarga korban PHK.

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Barat – Kabupaten Bandung- Kecamatan Dayeuhkolot. Pada kecamatan ini diambil dua desa dan satu kelurahan sebagai sasaran penelitian ini, yaitu : Desa Cangkuang Wetan; Desa Citeureup; dan Kelurahan Pasawahan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan tingkat kerentanan kemiskinan, maka masalah kemiskinan dapat dibagi menjadi dua kategori (lihat Depsos, 2005 :18), yaitu : **pertama**, kemiskinan kronis (*chronic poverty*) adalah kemiskinan yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, turun temurun, atau disebut juga sebagai kemiskinan struktural. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dikategorikan sebagai Fakir Miskin termasuk kategori kemiskinan kronis, yang membutuhkan penanganan yang sungguh-sungguh, terpadu secara lintas sektor dan berkelanjutan. **Kedua**, kemiskinan sementara (*transient poverty*) adalah kemiskinan yang ditandai dengan menurunnya pendapatan dan kesejahteraan anggota masyarakat secara sementara sebagai akibat dari perubahan kondisi normal menjadi kondisi kritis, bencana alam dan bencana sosial, seperti korban konflik sosial, korban gempa bumi, korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Kemiskinan sementara jika tidak ditangani serius dapat menjadi kemiskinan kronis.

Menurut Gunawan Sumodiningrat (1999) ada beberapa pola kemiskinan yang patut dicatat, yaitu : **Pertama**, dari pola waktunya, kemiskinan di suatu daerah dapat digolongkan sebagai *persistent poverty*, kemiskinan yang telah kronis atau turun-temurun. Daerah seperti itu pada umumnya merupakan daerah-daerah kritis sumber daya alamnya, atau daerahnya terisolasi. **Pola kedua**, adalah *cyclical poverty*, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. **Pola ketiga** adalah *seasonal poverty*, yaitu kemiskinan musiman seperti sering di jumpai pada kasus-

kasus nelayan dan petani tanaman pangan. **Pola keempat** adalah *accidental poverty*, yaitu kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijaksanaan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

Mencermati pola-pola kemiskinan yang telah di kemukakan di atas, berarti pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan suatu kebijakan yang berdampak terhadap menurunnya tingkat kesejahteraan para korban PHK, berarti mereka ini bila dilihat dari sisi pola kemiskinan termasuk golongan *accidental poverty*. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Pada kenyataannya pemutusan hubungan kerja pada umumnya tidak langsung diberi pesangon sekaligus, tetapi dicicil dan realisasinya sering terlambat sehingga pada kondisi demikian para korban PHK termasuk dalam kategori kemiskinan sementara.

Masalah kemiskinan pada dasarnya bukan saja berurusan dengan persoalan ekonomi semata, tetapi bersifat multidimensional yang dalam kenyataannya juga berurusan dengan persoalan-persoalan non-ekonomi (sosial, budaya, dan politik). Karena sifat multidimensionalnya tersebut, maka kemiskinan tidak hanya berurusan dengan kesejahteraan materi, tapi juga berurusan dengan kesejahteraan sosial. Lebih lanjut Gunawan Sumodiningrat mengemukakan ada beberapa dimensi yang menyertai kemiskinan, yaitu : **Pertama**, yang paling jelas adalah bahwa kemiskinan berdimensi ekonomi atau material. Dimensi ini menjelma dalam berbagai kebutuhan dasar manusia yang sifatnya material, seperti pangan, sandang, dan perumahan. **Kedua**, kemiskinan berdimensi sosial dan budaya. Ukuran kuantitatif kurang dapat dipergunakan untuk memahami dimensi ini, sehingga ukurannya sangat kualitatif. Lapisan yang secara ekonomis miskin akan membentuk kantong-kantong kebudayaan yang disebut budaya kemiskinan. Budaya kemiskinan ini dapat ditunjukkan dengan terlembaganya nilai-nilai seperti : apatis; apolitis; fatalistik; ketidakberdayaan; dan lain sebagainya. **Ketiga**, kemiskinan berdimensi struktural atau

politik, artinya orang yang mengalami kemiskinan ekonomi pada hakikatnya karena mengalami kemiskinan struktural dan politis. Kemiskinan ini terjadi karena orang miskin tersebut tidak memiliki sarana untuk terlibat dalam proses politik dan tidak memiliki kekuatan politik, sehingga menduduki struktur sosial yang paling bawah.

Suharto (2005) mengutip pendapat Ellis (1984) menyatakan bahwa dimensi kemiskinan menyangkut aspek ekonomi, politik, dan sosial psikologis. Secara ekonomi kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Secara politik, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan (*power*). Kekuasaan dalam pengertian ini mencakup tatanan sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumber daya. Kemiskinan secara sosial-psikologis menunjuk pada kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan peningkatan produktivitas.

Dimensi –dimensi kemiskinan ini pada hakikatnya merupakan refleksi bahwa kebutuhan manusia tidak hanya bersifat ekonomi semata. Untuk itu, program pengentasan kemiskinan seyogyanya juga tidak hanya memprioritaskan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dimensi yang lain. Sehubungan dengan hal itu, penelitian ini ingin mengetahui kondisi sosial ekonomi keluarga korban PHK dengan harapan agar data dan informasi yang diperoleh dapat digunakan sebagai sumbang saran bagi unit terkait Kementerian Sosial untuk menyusun program penanggulangan kemiskinan sementara (*transient poverty*) agar tidak menjadi kemiskinan kronis (*chronic poverty*). Oleh karena itu, untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi keluarga korban PHK perlu diuraikan tentang apa yang dimaksudkan dengan keluarga dan bagaimana fungsinya.

Keluarga dalam pengertian Antropologi adalah satu jenis kelompok kekerabatan atau *kingroup*. Antara anggota keluarga terjalin hubungan kekerabatan (*kinship*). Dalam kehidupan tradisional pedesaan Indonesia, masyarakat desa di umpamakan sebagai sebuah kelompok kekerabatan sebagai keluarga besar (Marzali, 2005:169). Lebih lanjut

dikemukakan dengan pengertian tersebut muncul pertanyaan : Apakah inti dari hubungan kekerabatan ? Apakah esensi dari hubungan kekerabatan tersebut ? Intinya, adalah hukum pertemanan atau prinsip solidaritas, atau nilai keksetiakawanan. Hukum pertemanan, prinsip solidaritas, saling bantu membantu, saling merasakan sebagai inti dari hubungan kekeluargaan. Dari sini kita ingat akan nilai *cultural shared poverty*. Makna dari *shared poverty* adalah solidaritas kelompok kekerabatan, yaitu berat sama dipikul ringan sama dijinjing. Dalam nilai *shared poverty* ini tersimpan pemikiran bahwa meskipun orang desa pada umumnya miskin, tetapi adalah kewajiban setiap warga untuk menolong mereka yang lebih sengsara.

Berbeda halnya dengan kehidupan masyarakat perkotaan, bahwa *shared poverty* yang berdasarkan solidaritas kelompok kekerabatan semakin berkurang dibandingkan dengan kehidupan masyarakat pedesaan. Bentuk-bentuk keluarga di perkotaan lebih banyak dalam bentuk keluarga inti di bandingkan dengan bentuk keluarga yang di perluas (*extended family*). Keluarga inti terdiri dari suami, isteri dan anak-anak mereka (Goode, 2007 : 90). Istilah keluarga inti dalam ilmu Antropologi di sebut dengan keluarga batih, soma dan umpih. Keluarga inti atau keluarga batih di Negara-negara Barat disebut dengan istilah *nuclear family*. Beberapa keluarga inti, biasanya terdiri dari tiga atau empat kelompok hidup bersama dan terikat dalam keluarga besar, disebut dengan istilah *extended family*.

Orang tua berkewajiban untuk pertama kali mensosialisir anak-anak mereka, tapi dengan demikian pula mempertahankan kontrol sosial atas mereka meninggalkan rumah (Goode, 2007:136). Lebih lanjut William J.Goode menyatakan bahwa sosialisasi proses yang harus dilalui manusia muda untuk memperoleh nilai-nilai pengetahuan mengenai kelompoknya dan belajar mengenai peran sosialnya yang cocok dengan kedudukan sosialnya di situ. Kontrol sosial terhadap anak-anak sangat penting agar dalam evolusinya lebih tergantung kepada kebudayaan dan bukan atas naluri atau insting. Dalam arti masyarakat dan kebudayaannya menjadi tergantung pada efektivitas sosialisasi yaitu sejauhmana sang anak mempelajari nilai-nilai, sikap dan tingkah laku masyarakat dan

keluarga. Oleh karena itu, masyarakat harus membentuk atau menuntun unit yang meneruskan nilai-nilai kepada generasi berikutnya.

Sulistiati dalam artikelnya yang berjudul "Pemberdayaan Sosial Keluarga" yang dimuat dalam *Isu-Isu Tematik Pembangunan Sosial : Konsepsi dan Strategi*, menyatakan bahwa keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak serta kerabat lainnya merupakan suatu sistem. Lebih lanjut Sulistiati mengutip pendapat Goode (1991) mengartikan keluarga sebagai suatu unsur dalam struktur sosial dimana setiap anggotanya terikat dalam jaringan kewajiban dan hak.

Keberfungsiaan keluarga sebagai suatu sistem untuk dapat terwujud di masyarakat tergantung pada berbagai faktor. Salah satunya adalah kemampuan kerjasama para anggotanya untuk melaksanakan fungsi-fungsi keluarga antara lain : fungsi biologi; ekonomi; sosialisasi; dan perlindungan.

Fungsi biologi, dalam kehidupannya, manusia memiliki berbagai kebutuhan. Salah satunya yang cukup vital adalah kebutuhan biologi anggota keluarga. Diantara kebutuhan biologi ialah kebutuhan akan keterlindungan fisik guna melangsungkan kehidupannya, keterlindungan kesehatan, keterlindungan dari rasa lapar, haus, kedinginan, kepanasan, kelelahan, bahkan juga kenyamanan dan kesegaran fisik. Termasuk juga kebutuhan biologi ialah kebutuhan seksual antara suami dan isteri.

Fungsi ekonomi, meliputi pencarian nafkah, perencanaan serta pembelanjaan dan pemanfaatannya. Pada dasarnya suami-lah sebagai pemimpin rumah tangga mengambil tanggung jawab atas kesejahteraan keluarga, termasuk pencarian nafkah keluarga. Akan tetapi tidak berarti bahwa isteri tidak dibenarkan turut berupaya menggali sumber penghasilan.

Fungsi sosialisasi, adalah suatu proses yang harus dilalui manusia untuk memperoleh nilai-nilai dan pengetahuan mengenai kelompoknya dan belajar mengenai peran sosialnya yang cocok dengan kedudukannya. Selanjutnya dikemukakan bahwa keluarga memiliki peranan yang cukup besar dalam proses sosialisasi nilai, norma yang bersifat melestarikan maupun melahirkan

pembaharuan-pembaharuan.

Fungsi perlindungan, bahwa keluarga menjaga dan memelihara anak serta anggota keluarga lainnya dari tindakan negatif yang mungkin timbul baik dari dalam maupun dari luar keluarga. Fungsi ini sebenarnya berkaitan dengan fungsi pendidikan. Dengan memberikan pendidikan kepada anak dan anggota keluarga lainnya berarti memberi perlindungan secara mental dan moral, disamping perlindungan secara fisik.

III. HASIL PENELITIAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian berada di wilayah Kecamatan Dayeuhkolot- Kabupaten Bandung. Ibukota Kecamatan Dayeuhkolot berjarak 15 km dari pusat Kota Kabupaten Bandung dan 23 Km dari Kota Provinsi Jawa Barat. Wilayah Kecamatan Dayeuhkolot terdiri dari 5 (lima) desa dan 1 (satu) kelurahan, dengan jumlah penduduk sebanyak 94.751 jiwa, yang terdiri dari 46.681 jiwa laki-laki dan 48.060 jiwa perempuan.

Luas wilayah Kecamatan Dayeuhkolot kurang lebih 985.148,50 Ha, dengan rincian : (1) tanah sawah 108 Ha; (2) tanah kering 974.500 Ha, terdiri atas 484.250 Ha untuk pekarangan/bangunan/emplacement, dan tegalan atau kebun seluas 471.750 Ha; (3) tanah basah seluas 41,50 Ha (balong, empang, dan kolam); (4) fasilitas umum seluas 10.500 Ha; (5) lapangan olah raga 3.250 Ha; (6) jalur hijau 2.000 Ha; dan (7) selebihnya untuk taman rekreasi dan kuburan.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa Kecamatan Dayeuhkolot pada mulanya termasuk daerah agraris atau pertanian (padi, jagung, sayuran dan sebagainya). Namun mulai tahun 1947 di wilayah ini berdiri industri pertama kali, yaitu Pabrik Tekstil Patal Banjaran. Kehadiran pabrik tekstil ini, kemudian disusul pula munculnya beberapa pabrik lain, seperti Adetek yang berdiri pada tahun 1972. Dengan berkembangnya berbagai industri di wilayah ini sudah barang tentu membawa dampak terhadap lingkungan alam yang tadinya merupakan wilayah pertanian berubah menjadi kawasan industri. Hal ini juga membawa dampak terhadap mata pencaharian

penduduk yang tadinya bekerja di sektor pertanian berubah menjadi pekerja di sektor industri. Bertambahnya jumlah industri, sudah barang tentu membutuhkan jumlah tenaga kerja yang semakin banyak. Hal itu menjadi daya tarik bagi pendatang untuk bekerja di Kecamatan Dayeuhkolot baik sebagai karyawan industri maupun membuka usaha dagang dan transportasi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari monografi Kecamatan Dayeuhkolot, jumlah perusahaan/usaha yang ada di daerah ini adalah sebagai berikut: (1) **industri**, sebanyak 654 buah, dengan rincian industri besar dan sedang = 67 buah; industri kecil = 126 buah; usaha rumah tangga = 461 buah; (2) **Rumah makan/Warung makan** = 109 buah; (3) **Perdagangan** = 206 buah; dan (4) **Jasa angkutan** = 246 buah.

Pada umumnya, penduduk yang tinggal di wilayah Kecamatan Dayeuhkolot masih terikat satu sama lain oleh tali kekerabatan. Mereka berasal dari satu keturunan dan tinggal dalam wilayah yang sama dalam bentuk keluarga luas. Mereka memiliki hubungan sosial yang intensif dan saling mengenal. Hubungan sosial masyarakat di Kecamatan Dayeuhkolot ini tidak hanya didasarkan pada ikatan kekerabatan, mereka pun memiliki hubungan sosial dengan warga lain yang bukan kerabat sendiri. Hal tersebut bisa berbentuk hubungan sesama tetangga dalam kehidupan sehari-hari atau dalam berbagai kegiatan organisasi sosial yang ada. Organisasi sosial yang ada, antara lain PKK, BPD, Kelompok Arisan, Majelis Taklim, Serikat Pekerja Nasional (SPN), dan Karang Taruna. Melalui organisasi sosial mereka menyalurkan berbagai kepentingan bersama dan berpartisipasi dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

B. DESKRIPSI DATA DAN INFORMASI

Responden penelitian ini berjumlah 30 orang para korban PHK dari industri tekstil yang ada di wilayah Kecamatan Dayeuhkolot. Dari 30 responden penelitian ini diketahui hanya 8 orang perempuan dan sebanyak 22 orang laki-laki. Mereka berumur antara 26 sampai dengan 46 tahun, dengan rincian: (1) umur antara 26 sampai 30 tahun sebanyak 5 orang atau 16,66 persen; (2) umur antara 30 sampai 34 tahun sebanyak 11 orang atau 36,66 persen; (3) umur antara 34 sampai 38 tahun

sebanyak 4 orang atau 13,33 persen; (4) umur antara 38 sampai 42 tahun sebanyak 5 orang atau 16,66 persen; dan (5) umur antara 42 sampai 46 tahun sebanyak 5 orang atau 16,66 persen.

Mengenai pendidikan responden: sebanyak 17 orang atau 56,67 persen tamat SLTP; sebanyak 11 orang atau 36,67 persen tamat SLTA; dan masing-masing 1 orang atau 3,33 persen tamat SD dan Sarjana.

Pekerjaan mereka sebelum di PHK, sebagian besar (73,33 persen) adalah operator dan sisanya bekerja di bagian gudang, sopir, pengawas, maintainen, dan mekanik. Setelah mereka PHK, sebanyak 53,33 persen belum mendapat pekerjaan baru dan pesangon mereka belum di bayar, dalam arti mereka tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Sebanyak 46,66 persen atau 14 responden menyatakan bahwa mereka setelah PHK sudah memiliki pekerjaan lagi. Mereka yang sudah mendapat pekerjaan, sebanyak 6 responden menyatakan mereka bekerja sebagai pekerja serabutan. Sebanyak 3 responden kembali bekerja di perusahaan dengan sistem kontrak yang harus diperbaharui setiap bulan karena kondisi perusahaan yang pailit dan sewaktu-waktu dapat diberhentikan. Sisanya masing-masing 1 (satu) responden menyatakan bekerja sebagai guru privat, dagang, dan ikut dalam organisasi Serikat Pekerja Nasional (SPN). Penghasilan yang mereka terima jauh lebih kecil dibandingkan dengan penghasilan atau gaji mereka sebelum PHK.

Sebagian besar (90 persen) responden menyatakan mempunyai tanggungan sebanyak 3 sampai 5 orang. Hanya 2 responden menyatakan mempunyai tanggungan 5 sampai 7 orang dan 1 responden menyatakan mempunyai 1 sampai 3 tanggungan.

Sebagian besar (73,33 persen) responden berasal dari Bandung. Sedangkan sisanya sebanyak masing-masing 2 responden menyatakan berasal dari Majalengka dan Banyumas. Masing-masing sebanyak 1 responden menyatakan berasal dari: Subang; Tasikmalaya; Kebumen; dan Garut.

Data dan informasi di atas merupakan hasil wawancara terhadap responden korban PHK. Adapun hasil wawancara dengan instansi sektoral dan industri tekstil, dapat dikemukakan

bahwa Dinas Perindustrian dan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bandung telah melaksanakan pelatihan keterampilan terhadap para PHK dan mereka akan disalurkan kepada perusahaan – perusahaan yang membutuhkan sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki. Sedangkan menurut informasi dari pihak industri mereka terpaksa di PHK, karena pesanan terhadap produk tekstil dari luar negeri semakin menurun berdampak terhadap menurunnya produktivitas industri, sehingga jalan keluar yang diambil adalah menurunkan jumlah tenaga kerja yang ada. Apabila kondisi perekonomian normal kembali, terutama bagi tenaga kerja yang di rumahkan akan dipanggil kembali untuk bekerja.

Disamping wawancara dengan para korban PHK dan instansi sektoral, diadakan pula *Focus Group Discussion* (FGD) di Desa Cangkung Wetan pada hari Minggu tanggal 6 September 2009. Peserta FGD adalah tokoh masyarakat baik formal maupun informal termasuk pejabat dari Kantor Camat Dayeuhkolot. Hasil FGD menyatakan dampak yang ditimbulkan dengan adanya PHK antara lain : (1) menurunnya kualitas pendidikan sampai drop out ; (2) menurunnya kesehatan masyarakat; (3) timbulnya berbagai penyakit masyarakat (stress, jantung yang mengakibatkan meningkatnya angka kematian); (4) memacu angka kriminalitas; (5) menurunnya tingkat kesejahteraan para korban PHK; (6) timbulnya kekerasan dalam rumah tangga ; dan (7) memacu angka perceraian. Apabila kondisi ini berlangsung lama akan berdampak pada masalah sosial lainnya, seperti kenakalan remaja , stress sebagai akibat tekanan psikologis, larinya isteri dari rumah dengan dalih mencari kerja di tempat lain. Solusi untuk meredam dampak yang ditimbulkan oleh PHK, antara lain : (1) memberikan keterampilan usaha sesuai dengan tuntutan pasar; (2) memberikan stimulan modal; (3) memberikan arahan, pembinaan secara continue; (4) memberikan pengetahuan manajemen usaha; (5) melakukan pengawasan terhadap perkembangan usaha yang dilakukan ; (6) memberikan bantuan khusus untuk menunjang pendidikan dan kesehatan keluarga korban PHK; (7) adanya perhatian pemerintah guna membantu meringankan beban masyarakat dengan menciptakan program secara komprehensif dari bahan baku sampai

pemasaran hasil; dan (8) dapat pula digerakkan potensi yang ada di masyarakat yang penduduknya mayoritas agama Islam dengan mengelola zakat harta melalui Rumah Zakat.

C. ANALISIS

Berdasarkan gambaran umum lokasi penelitian dan deskripsi data dan informasi yang telah dikemukakan di atas, maka dapat di analisis mengenai : (1) karakteristik permasalahan dan potensi keluarga korban PHK; (2) potensi lingkungan yang dapat dipergunakan untuk penanganan masalah sosial – ekonomi yang dihadapi keluarga korban PHK; dan (3) komitmen pemerintah daerah dalam penanganan masalah sosial – ekonomi keluarga korban PHK.

1. Karakteristik Permasalahan dan Potensi Keluarga Korban PHK

Pada umumnya para pekerja di sektor industri tekstil yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai akibat munculnya krisis ekonomi global adalah para pekerja yang berusia relatif masih muda antara umur 26 sampai dengan 46 tahun dan lebih dari separuhnya berusia antara 26 tahun sampai 34 tahun dengan masa kerja relatif baru. Mereka pada umumnya belum mempunyai tabungan, sehingga dengan terjadinya PHK mereka dihadapkan pada permasalahan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum, seperti makan, pakaian, pendidikan anak, kesehatan dan sebagainya. Dalam kondisi pengangguran dan uang pesangon serta dana asuransi belum diberikan oleh pihak perusahaan, untuk mengatasi kebutuhan pokok sehari-hari, mereka mencari pinjaman kepada famili, teman, dan tetangga.

Kondisi demikian menunjukkan gejala menurunnya pendapatan dan kesejahteraan keluarga secara sementara yang biasa disebut dengan kemiskinan sementara (*transient poverty*) sebagai akibat dari perubahan kondisi normal menjadi kondisi kritis. Apabila dilihat dari sisi pola kemiskinan, berarti kemiskinan sementara ini dapat pula digolongkan sebagai kemiskinan *accidental poverty*, yaitu kemiskinan sebagai dampak dari suatu kebijakan tertentu (PHK) yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan keluarga korban pemutusan hubungan kerja.

Hasil pengamatan terhadap kondisi tempat tinggal para keluarga korban PHK menunjukkan bahwa mereka menempati rumah sederhana dengan fasilitas relatif terbatas. Hal ini mencerminkan bahwa keluarga korban PHK termasuk kategori keluarga miskin.

Hasil *Focus Group Discussion (FGD)* yang dilakukan terhadap tokoh masyarakat, baik *formal maupun informal di Desa Cangkung Wetan* pada Hari Minggu Tanggal 6 September 2009 mengemukakan apabila kondisi sosial – ekonomi keluarga korban PHK tidak segera ditanggulangi akan berdampak pada masalah sosial lainnya, seperti terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anak mereka. Ini mencerminkan suatu keluarga yang tidak harmoni atau disharmonisasi keluarga. Kondisi keluarga yang demikian akan memicu munculnya permasalahan sosial lainnya, seperti kenakalan remaja, stress sebagai akibat tekanan psikologis, isteri keluar dari rumah dengan dalih mencari kerja di tempat lain, meningkatnya angka perceraian, menurunnya kualitas kesehatan masyarakat, menurunnya kualitas pendidikan sampai drop out (DO), dan lain sebagainya.

Mengenai potensi yang dimiliki pekerja yang terkena PHK, yaitu mereka pada umumnya masih berusia muda dan mempunyai keterampilan sehingga dapat melaksanakan pekerjaan di sektor lain. Sebanyak 46,66 persen dari mereka yang terkena PHK, telah mendapat pekerjaan baru, antara lain : buruh lepas; mengajar privat; dagang; serabutan; dan beternak. Penghasilan mereka sekarang dibandingkan dengan penghasilan mereka sebelum di PHK jauh berbeda atau lebih kecil dari gaji mereka sebagai karyawan industri tekstil.

2. Potensi Lingkungan

Kecamatan Dayeuhkolot pada mulanya termasuk daerah agraris, kemudian menjadi daerah industri. Jumlah perusahaan/usaha yang ada di daerah ini adalah sebagai berikut : (1) **Industri**, sebanyak 654 buah dengan rincian, **industri besar** sebanyak 67 buah, **industri kecil** sebanyak 126 buah, dan **industri rumah tangga** sebanyak 206 buah; (2) **Rumah Makan/Warung Makan** sebanyak 109 buah; (3) **Perdagangan** sebanyak 206 buah

; dan (4) **Angkutan** sebanyak 246 buah.

Perusahaan atau jenis usaha yang di kemukakan di atas, merupakan fasilitas berupa peluang bagi para korban PHK untuk bekerja di sektor lain sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki. Disamping potensi yang telah dikemukakan tersebut, sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan sosial – ekonomi yang di hadapi keluarga korban PHK, dapat juga digerakkan potensi yang ada di masyarakat yang mayoritas penduduknya beragama Islam dengan mengelola zakat harta melalui Rumah Zakat.

Potensi lain yang dapat dikemukakan bahwa pada umumnya penduduk yang tinggal di wilayah Kecamatan Dayeuhkolot terikat satu sama lainnya oleh tali kekerabatan. Mereka berasal dari satu keturunan dan tinggal dalam wilayah yang sama dalam bentuk keluarga luas (*extended family*). Orang yang hidup dalam suatu komunitas seperti ini biasanya memiliki hubungan sosial yang intensif dan saling kenal satu sama lainnya. Hubungan sosial masyarakat kelurahan/desa di wilayah Kecamatan Dayeuhkolot tidak hanya didasarkan pada ikatan kekerabatan, tapi mereka menjalin hubungan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam berbagai kegiatan organisasi sosial atau organisasi kemasyarakatan yang ada di mana mereka tinggal. Organisasi sosial/ kemasyarakatan tersebut merupakan suatu wadah bagi para warga dalam menyalurkan kepentingan bersama dengan beberapa warga lainnya. Ada beberapa organisasi sosial yang dapat di jumpai di wilayah Kecamatan Dayeuhkolot, antara lain yaitu : PKK; BPD; Karang Taruna; Serikat Pekerja Nasional (SPN). Disamping itu tidak kalah pentingnya dalam kehidupan masyarakat adanya berbagai perkumpulan, seperti Kelompok Arisan, pengajian dan gotong- royong atau tolong menolong.

3. Komitmen Pemerintah Daerah

Komitmen pemerintah daerah untuk menangani permasalahan sosial – ekonomi keluarga korban PHK, nampaknya cukup memberi harapan untuk meningkatkan kualitas hidup para keluarga korban PHK. Hasil wawancara terhadap Instansi Dinas Perindustrian dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung menyatakan bahwa mereka membantu para korban PHK dengan

cara memberi pelatihan keterampilan, dan kemudian menyalurkan mereka ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki.

Begitu pula halnya dengan pemerintah daerah, khususnya Kecamatan Dayeuhkolot dalam FKG mengemukakan solusi untuk meredam dampak yang ditimbulkan PHK di Kecamatan Dayeuhkolot – Kabupaten Bandung, yaitu : (a) memberikan keterampilan usaha sesuai dengan tuntutan pasar dan kemampuan; (b) memberikan stimulant modal; (c) memberikan arahan, pembinaan secara continue; (d) memberikan pengetahuan manajemen usaha; (e) melakukan pengawasan terhadap perkembangan usaha yang dilakukan; (f) memberikan bantuan khusus untuk menunjang pendidikan dan kesehatan masyarakat korban PHK; dan (g) adanya perhatian pemerintah guna membantu meringankan beban masyarakat dengan menciptakan program secara komprehensif dari bahan baku sampai pemasaran hasil.

Semoga program yang telah dikemukakan dapat dilaksanakan dengan baik dan berhasil untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga korban PHK, sehingga keluarga korban PHK dapat melaksanakan fungsi sosial setidaknya kembali kepada kondisi keluarga sebelum mereka terkena PHK.

IV. KESIMPULAN SARAN

A. Kesimpulan

Permasalahan yang dihadapi keluarga korban PHK, terutama masalah ekonomi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi ini kalau terjadi dalam waktu yang relatif lama akan berdampak kepada permasalahan sosial lainnya, seperti terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kenakalan remaja, terhambatnya pendidikan anak atau *drop out* (DO), meningkatnya angka kriminalitas, meningkatnya angka perceraian, menurunnya kesehatan masyarakat, dan lain sebagainya.

Potensi yang terdapat pada pekerja yang terkena PHK, yaitu : mereka pada umumnya masih dalam usia produktif, dan memiliki keterampilan, sehingga masih mempunyai peluang untuk bekerja di sektor lain sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki.

Potensi lingkungan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh para keluarga korban PHK sebenarnya cukup tersedia, hal mana mereka dapat bekerja di perusahaan-perusahaan lain yang jumlahnya cukup banyak di Kecamatan Dayeuhkolot. Disamping itu potensi lainnya adalah penduduk yang mayoritas agama Islam dihimbau untuk melaksanakan kewajibannya membayar zakat mal/harta melalui Rumah Zakat yang dikelola dengan baik.

Komitmen pemerintah daerah terhadap permasalahan sosial – ekonomi yang dihadapi oleh keluarga korban PHK dipandang cukup memadai, namun masih perlu ditingkatkan dengan cara memberi pelatihan keterampilan disertai dukungan dana untuk mereka membuka usaha secara mandiri.

B. Saran

1. Disarankan kepada unit terkait Kementerian Sosial untuk melaksanakan program pemberdayaan keluarga korban PHK untuk mencegah kemiskinan sementara (*transient poverty*) menjadi kemiskinan kronis (*chronic poverty*).
2. Penanggulangan kemiskinan merupakan kewajiban bersama antara pemerintah Pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam melaksanakan program pemberdayaan keluarga korban PHK hendaknya terjalin kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Sosial RI . 2005 . Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan – Program Pemberdayaan Fakir Miskin Tahun 2006 – 2010, Jakarta : Ditjen Bantuan dan Jaminan Sosial.
- Departemen Sosial RI . 2003 . Pola Pemberdayaan Peran Keluarga, Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Peran Keluarga.
- Goode, William J . 2007 . Sosiologi Keluarga (Penerjemah : Hasyim, Lailahanoum), Jakarta : Pt Bumi Akasara.
- Kompas .2009 . PHK 200.000 Orang, Jakarta : Kompas, Jumat 6 Februari.
- Kompas . 2009 . Sudah 37.906 Buruh Di PHK, Jakarta : Kompas, Jumat 6 Maret.
- Kompas . 2009 . 100.000 Buruh Kontrak Di PHK, Jakarta : Kompas, Jumat 18 Maret.
- Marzali, Amri . 2005 . Antropologi & Pembangunan Indonesia, Jakarta : Prenada Media.
- Sumodiningrat, Gunawan . 1999 . Kemiskinan : Teori, Fakta Dan Kebijakan , Jakarta : IMPAC.
- Suharto, Edi .2005 . Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial, Bandung : PT Refika Aditama.
- Sulistiati . Tanpa Tahun . Pemberdayaan Sosial Keluarga (Artikel Dalam Isu-isu Tematik Pembangunan Sosial : Konsepsi dan Strategi, SERI IT : 02), Jakarta : Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial – Departemen Sosial RI.

Biodata Penulis :

Abu Hanifah : Peneliti Pada Pusat Penelitian Dan Pengembang Kesejahteraan Sosial.

Suyanto : Peneliti Pada Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat.